

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KECAMATAN KRAYAN**

**Dobie Steven<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Dobie Steven, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kecamatan Krayan, di bawah bimbingan bapak Drs. Daud Kondorura, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Budiman, S.IP, M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah kabupaten nunukan dalam membangun wilayah perbatasan di kecamatan krayan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembangunan wilayah perbatasan di kecamatan krayan. Penelitian yang ditetapkan mengenai kebijakan pemerintah kabupaten nunukan dalam pembangunan wilayah perbatasan di kecamatan krayan : meliputi pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur di berbagai bidang seperti jalan, Telekomunikasi, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, serta faktor yang menghambat dalam pembangunannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis menggambarkan keadaan tentang kebijakan pemerintah kabupaten nunukan dalam pembangunan wilayah perbatasan di kecamatan krayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, serta mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan penulis dalam penelitian.*

*Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan kebijakan pemerintah kabupaten nunukan untuk membangun wilayah perbatasan belum maksimal. Terlebihnya di wilayah kecamatan krayan yang dapat dijangkau dengan transportasi udara sehingga pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik yang meliputi jalan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi kondisinya memperhatikan dan pembangunannya belum maksimal.*

***Kata Kunci:*** *Kebijakan Pemerintah, Pembangunan, Kecamatan Krayan*

### **PENDAHULUAN**

Negara republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia

---

<sup>1</sup>Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh (Dobie Steven) Mahasiswa tingkat Akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dobiesteven769@yahoo.co.id

saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berdasarkan dan pedoman pada Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan dalam segala bidang seperti bidang keamanan nasional dan kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kemajuan bangsa serta rakyat Indonesia secara seluruhnya. Dengan adanya pembangunan dapat memacu percepatan terwujudnya pemerataan pembangunan sehingga diharapkan lebih baik dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberi definisi yang jelas pada hakikat pembangunan Indonesia. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan pembangunan agar pembangunan itu bisa menyentuh ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang terisolir dari jangkauan. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami tentang kondisi daerahnya sendiri.

Wilayah daerah perbatasan darat merupakan daerah yang terpencil secara geografis dan sosial ekonomi sehingga masyarakat menjadi seolah-olah terpinggirkan. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI.

Undang-undang RI No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 1 ayat (6) menjelaskan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan

Kebijakan pemerintah daerah dalam pemabangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan faktor pendukung dalam menciptakan masyarakat perbatasan yang berdaya baik secara kolektif dan aktif, karena kondisi yang terjadi di kawasan perbatasan mengalami ketertinggalan, begitu sangat jauh dari kesejahteraan, pemerataan, serta sensitif/rawan terhadap permasalahan. Maka berdasarkan hal tersebut perlulah diciptakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah khususnya kabupaten nunukan agar

masyarakat di kawasan perbatasan tersebut dapat mencapai kemakmuran, dan kesejahteraan.

Kondisi daerah perbatasan yang tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan infrastruktur seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang rendah, bahwa kondisi daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta wilayahnya masih sangat terbatas, dan relatif tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum berdampak kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Krayan. Kondisi yang sekarang terjadi masyarakat belum bisa dikatakan sejahtera dikarenakan infrastruktur, seperti jalan yang masih rusak parah belum ada perbaikan dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Masih banyak bangunan sekolah yang belum rampuh sehingga membuat para pelajar tidak merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Sedangkan di bidang kesehatan masih kurangnya tenaga medis. Sehingga ada beberapa warga di kecamatan krayan yang pindah ke Malaysia untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari.

Kecamatan Krayan merupakan salah satu Kecamatan dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Untuk mencapai Krayan di butuhkan waktu 1 jam perjalanan dari Nunukan dan Tarakan sedangkan Malinau dibutuhkan 30 menit perjalanan dengan menggunakan pesawat (*Susi Air*) dan pesawat MAF (*Mission Aviliattion Fellowship*) yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan transportasi udara.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Kebijakan***

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Thomas Dye (2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).

Menurut Lasswell dan Kaplan (2012:7) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projected program of goal, values and practices*).

Menurut William Dunn (2012:8) mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu social untuk pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

### ***Pembangunan***

Menurut Rogers dan Shoemaker (2006:8) Pembangunan adalah jenis perubahan sosial dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memberikan tingkat kehidupan yang lebih tinggi pula melalui organisasi sosial yang baik dan produksi modern.

Menurut Seers (2006:9) Pembangunan adalah istilah teknis untuk membangkitkan kualitas hidup warga negara berkembang dengan cara menyadarkan mereka tentang kualitas pendidikan yang masih rendah, jumlah pengangguran yang masih banyak yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam kehidupan sosial.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Pembangunan itu sendiri kepada usaha mencapai tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sesuai dengan hakekat Pembangunan Nasional, ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bahtiar Efendi (2002:9)

Dalam pembangunan infrastruktur, Bahtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibanding dengan yang lain. Sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

### ***Pembangunan Fisik***

Menurut Mubiyanto (2002:35) Pembangunan fisik maksudnya adalah pembangunan yang Nampak secara nyata dan berwujud, adapun indikator-indikator yang dapat memperjelas tentang pembangunan fisik adalah :

#### **1. Prasarana Perhubungan**

Yang dimaksud sarana perhubungan disini adalah jalan, baik jalan di gang-gang maupun jalan-jalan menuju ibukota kecamatan dan lintas perbatasan

Negara serta jembatan-jembatan, dan juga yang berhubungan dengan prasarana komunikasi, antara lain signal televisive, signal radio, telepon selular, HT (*handy talky*)

2. Prasarana Produksi

Yang dimaksud dengan sarana produksi disini adalah hal-hal yang menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat, yang berupa prasarana. Yang dapat dikategorikan prasarana produksi misalnya pabrik, irigasi, pasar, sawah, ladang/kebun, dan sebagainya.

3. Prasarana Sosial Budaya

Prasarana sosial budaya disini adalah setiap bangunan yang dalam pemakaiannya bersifat umum atau bersama. Termasuk prasarana sosial budaya misalnya gedung sekolah, balai pertemuan, rumah-rumah ibadah, klinik kesehatan, dan sebagainya.

### ***Pembangunan Infrastruktur***

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi istem social dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi, yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur yang kurang akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat kebijakan.

### ***Daerah Perbatasan***

Wilayah perbatasan darat di Indonesia umumnya merupakan kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial merupakan ciri yang menonjol dari kawasan-kawasan di wilayah ini yang ditandai dengan keterbatasan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang diperlukan bagi upaya pengembangan wilayah.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan konsep dan teori diatas, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yang juga merupakan batasan terhadap penelitian skripsi yang dilakukan yaitu “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan di kecamatan krayan adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten nunukan untuk membangun kawasan perbatasan yang lebih baik dalam rangka menciptakan pembangunan yang menyeluruh, merata dan berkesinambungan dalam mewujudkan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah kabupaten nunukan dalam pembangunan wilayah perbatasan di kecamatan krayan

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan di kecamatan krayan yang meliputi :
  - a. Pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik
    - 1). Jalan
    - 2). Telekomunikasi
    - 3). Pendidikan
    - 4). Kesehatan
    - 5). Transportasi
2. Faktor yang menghambat dalam pembangunan wilayah daerah perbatasan di kecamatan krayan kabupaten nunukan.

### ***Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan.***

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten nunukan dalam membangun wilayah perbatasan menjadi lebih baik. Pembangunan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pemerintah Kabupaten Nunukan mempunyai prioritas dalam membangun wilayah perbatasan,

diantaranya adalah pembangunan infrastruktur di berbagai bidang dan disekitarnya.

Sementara untuk pembangunan jalan Long Bawan –Pa’pani –Long Pasia, kelanjutan pembangunannya masih terkendala persetujuan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dari Kementerian Kehutanan. Dari 45 km yang direncanakan, sudah terealisasi 11,7 km, sedangkan sisanya 33,3 km belum dapat dilanjutkan karena trase jalan melintasi Taman Nasional Kayan Mentarang. Pemprov Kaltim sendiri telah berupaya melakukan perubahan fungsi kawasan melalui RTRW Provinsi.

Untuk pembangunan di kecamatan krayan Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menganggarkan sebesar 30 persen dari dana APBD setiap tahunnya. Untuk tahun 2015 APBD kabupaten Nunukan sebesar Rp.1,2 triliun dimana 30 persen dari APBD tersebut adalah untuk pembangunan wilayah perbatasan di kecamatan krayan.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 pada bagian lampiran huruf h mengenai Wilayah dan Tata Ruang pada point 4 disebutkan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.

### ***Pembangunan Fisik atau Infrastruktur di Kecamatan Krayan.***

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi. Bandara, jembatan, jalan dan juga pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan dan infrastruktur di sebuah kecamatan krayan yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia supaya masyarakat di kecamatan krayan mendapatkan kesejahteraan dalam pembangunan. Perhatian pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting dan berguna untuk masyarakat di kecamatan krayan dalam menunjang produktifitas dan efisiensi perekonomian di kecamatan krayan.

Pembangunan Infrastruktur di kecamatan krayan harus merata di semua bidang baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perhatian pemerintah kabupaten nunukan dalam pemabangunan di wilayah perbatasan khususnya kecamatan krayan sangatlah penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di kecamatan krayan. Karena kecamatan krayan merupakan wilayah yang dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, sehingga pemerintah kabupaten nunukan harus mempunyai rumusan kebijakan khusus untuk pembangunan wilayah di kecamatan krayan ini dengan fokusnya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif bagi warga yang tinggal wilayah kecamatan krayan, supaya pembangunan infrastruktur itu dapat

membantu masyarakat yang ada dikrayan menjalankan roda perekonomian dengan baik.

### ***Jalan***

Pembangunan jalan tembus antar kedua kecamatan krayan - kecamatan krayan selatan yang melewati desa-desa dikecamatan krayan seperti desa Kuala Belawit, Padat Karya, dan Lembudud saat ini pembangunannya sedang berlangsung dengan membuka merintis jalan, pembangunan jalan tersebut dimaksudkan untuk membuka akses kedua kecamatan yang sama-sama sebagai daerahperbatasan yang terisolir, pembangunan jalan ini telah berlangsung kurang lebih 10 tahun terakhir pembangunan jalan tersebut dikenal dengan jalan lingkaran krayan. Pembangunan jalan tersebut tidaklah semudah yang dipikirkan mengingat kondisi medan yang bergunung dengan hutan yang lebat dan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga menjadi kendala tersendiri dalam membuka akses jalan tersebut.

### ***Telkomunikasi***

Bagi warga perbatasan sampai saat ini mengeluhkan kondisi telekomunikasi yang belum ada. Padahal sebagai beranda depan telekomunikasi merupakan kebutuhan pokok, di mana negara bisa cepat memberikan layanan informasi pada masyarakat setempat, Jika telekomunikasi lancar, maka banyak permasalahan di kawasan perbatasan yang bisa lebih cepat ditangani. kawasan perbatasan masih rawan berbagai hal. Penyelundupan orang, pencurian kayu, masuknya narkoba, dan lainnya. Jika telekomunikasi ada, masyarakat bisa segera melapor bila mendengar hal itu kepada pihak berwajib

Pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi sangatlah penting untuk masyarakat di kecamatan krayan, dikarenakan masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan tepat. Sebagaimana masyarakat dapat menggunakan fasilitas telekomunikasi ini dengan bijak, untuk membantu masyarakat berkomunikasi dengan sanak saudaranya yang berada jauh di kota.

### ***Pendidikan***

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Diantara banyak kesenjangan pembangunan tersebut, pembangunan di bidang pendidikan di daerah perbatasan sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Tampaknya sila ke-5 Pancasila yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan Pembukaan UUD 1945 yang



mengamanahkan "bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan" tetap menjadi simbol dan cita-cita semu belaka.

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan tersebut bukanlah hal yang baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus gudang terbelakang dalam pembangunan nasional termasuk bidang pendidikan. Bagaimana tidak, kecamatan krayan yang berbatasan dengan Malaysia misalnya siswanya masih banyak yang buta huruf belum bias membaca, ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten nunukan.

### ***Kesehatan***

Pembangunan rumah sakit harus dilakukan di Kecamatan Krayan dengan pertimbangan, kawasan tersebut sangat membutuhkan sarana kesehatan yang mendukung pelayanan di perbatasan negara. Karena memang rumah sakit ini untuk daerah yang sangat terpencil, yang susah terjangkau pelayanan oleh rumah sakit umum daerah. Perlunya perhatian dari pemerintah kabupaten nunukan dalam membangun pembangunan fisik rumah sakit dan puskesmas yang lebih banyak lagi, setiap desa dibangun 1 puskesmas pembantu (PUSTU) supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat di perbatasan yang di tinggal diwilayah perbatasan ini. Disertai dengan adanya tim medis seperti Dokter, bidan, perawat yang lengkap dan siap siaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan yang cepat, yang dapat meminimalisir mengurangi angka kematian manusia di kecamatan krayan.

### ***Trasnportasi***

Tranportasi menurut fungsinya adalah untuk melayani orang, barang, jasa lokal, regional, dan internasional serta berfungsi sebagai pendukung pembangunan berbagai bidang. Sistem transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut.

Jika dilihat dari sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kecamatan Krayan, sarana tranportasi darat dan udara merupakan pilihan utama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi udara berupa pesawat terbang apabila masyarakat ingin berpergian ke Kabupaten Nunukan untuk berlibur ataupun jalan-jalan maupun untuk berpergian kedaerah lain. Sedangkan transportasi darat, sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil, baik itu perjalanan antar desa ke desa yang lainnya dan juga perjalanan ke kampung Serawak Malaysia untuk membeli sembako untuk kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari.

### ***Faktor-faktor Penghambat dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kecamatan Krayan***

Dalam pembangunan suatu wilayah perbatasan, tidak bisa dihindari akan adanya faktor penghambat jalannya pembangunan. Namun, hambatan yang ada

tidak menyebabkan suatu pembangunan akan berhenti, melainkan secara bersama-sama mencari solusi yang terbaik yang tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah perbatasan :

1. Mahalnya harga BBM yang digunakan untuk biaya operasional, yang berpengaruh pada mahalnya biaya pembangunan di daerah perbatasan.
2. Alat berat Traktor, Truk, Budozer yang digunakan pada umumnya sudah tua sehingga proyek pembangunan jalan menjadi terhambat.
3. Keadaan medan dan kondisi geografis yang bergunung dan berbukit yang memiliki hambatan tersendiri dalam pembangunan.
4. Keadaan cuaca yang tidak menentu serta sulit diprediksi, kadang hujan kadang panas sehingga pekerjaan terhambat karena memiliki masalah tersendiri dengan keadaan medan yang berat, terjal dan licin.
5. Sulitnya mendapatkan bahan material dan mahalnya harga material bangunan tersebut (Semen, Paku, Besi, Cat dan lain-lain) yang pada umumnya didapatkan dari Malaysia.
6. Keterisolir wilayah perbatasan sehingga memiliki masalah tersendiri dalam pembangunan kawasan perbatasan.
7. Kurang seriusnya perhatian dari pemerintah dalam merealisasikan program kebijakan yang dirumuskan sebelumnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dengan ini penulis mencoba menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Masalah Perbatasan adalah masalah kedaulatan negara dan harga dan harga diri bangsa, oleh karena itu apapun alasannya pembangunan perbatasan harus dilaksanakan.
2. Pembangunan Infrastruktur, peningkatan SDM dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, telkomunikasi, pendidikan, kesehatan dan transportasi merupakan prioritas utama untuk terciptanya masyarakat perbatasan yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga. Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan dan misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan

negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

4. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga.

### ***Daftar Pustaka***

- Bappeda Kalimantan Timur, 2002, Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur 2003-2008, Bappedal Kaltim Samarinda
- Efendi, Bahtiar, 2002, Hal Utama Dalam Pembangunan, Andi Offset, Yogyakarta
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Pengantar Metodologi Penelitian Masyarakat, Bandung: Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2006, Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Moleong, Lexy J., 2006, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remiga Rosdakarya
- Suharno, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mngkaji Masalah dan Kebjikan Sosial. Bandung : Alfabeta PT. Gramedia
- Yansen, TP. 2014. Revolusi dari Desa, saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat. Jakarta :
- Tarigan, R., 2006, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Yansen TP. 2013. Gerakan Desa Membangun, Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa. Malang: PT. Danar Wijaya.
- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. refika Aditama
- Winarno, Budi. 2007. Asas-asas, Ciri-ciri, Kebijakan Publik. Bandung: PT Remiga Rosdakarya

***Dokumen :***

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional (SPPN)

***Sumber Internet :***

<http://Wikipedia.blogspot.com/Pembangunan> wilayah perbatasan

(di akses 12 April 2015)